

Implementasi Kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru

Mahroza Aslam Huda¹ Khairul Amri²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: mahroza.aslam0108@student.unri.ac.id, khairul.amri@lecture.unri.ac.id

Abstrak

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk didalamnya makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem masih terdapat permasalahan yaitu masih ada masyarakat miskin ekstrem di kota Pekanbaru, program pemberdayaan masyarakat belum optimal, dan masih ada masyarakat yang tidak update data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, karakteristik pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru belum optimal. Kendala yang terjadi yaitu data masyarakat miskin ekstrem tidak *update* dan terjadinya *miss-communication*.

Kata Kunci: Implementasi, Penghapusan, Kemiskinan Ekstrem

Abstract

Extreme poverty is a condition that cannot fulfill primary human needs, including food, clean drinking water, sanitation facilities, health, shelter, education, and information. In the implementation of the extreme poverty elimination policy, there are still problems, namely that there are still extreme poor people in Pekanbaru city, the community empowerment program is not optimal, and there are still people who do not update their data. This research uses a qualitative research method with a descriptive phenomenological approach. This research refers to Van Meter and Van Horn's theory, namely standards and objectives, resources, inter-organizational communication, implementer disposition, implementer characteristics, and social, economic, and political conditions, with data collection techniques from interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of accelerating the elimination of extreme poverty in Pekanbaru City was not optimal. The obstacles that occur are that the data on the extreme poor is not updated and there is a miss-communication.

Keywords: Implementation, Elimination, Extreme Poverty



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimum. Faktor yang dominan yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan diantaranya pendidikan, pendapatan, lokasi, keterbatasan akses kesehatan, dan keuangan. Standar kehidupan minimum ditentukan berdasarkan kebutuhan pokok pangan dan hidup sehat yang didasarkan pada kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Dimensi kemiskinan juga bersifat kompleks, karena itu para ahli mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan yaitu:

1. Kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Ini mengakibatkan peluang industri yang rendah khususnya dalam sektor pertanian. Kemiskinan alam diakibatkan karena kualitas iklim dan lahan yang tidak mendukung aktivitas pertanian.
2. Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha memperbaiki diri dari pihak lain yang mau membantu.
3. Kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang secara langsung atau tidak secara langsung yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan

Tabel 1. Jumlah Pengangguran di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Jumlah Pengangguran		
	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	8.376	3.291	3.998
Indragiri Hulu	10.571	7.291	5.450
Indragiri Hilir	15.782	9.685	5.141
Pelalawan	14.223	5.915	6.721
Siak	12.292	9.745	14.338
Kampar	23.911	16.797	14.219
Rokan Hulu	13.958	7.537	12.164
Bengkalis	24.518	17.910	18.227
Rokan Hilir	13.205	9.851	15.073
Kepulauan Meranti	7.475	4.060	5.048
Pekanbaru	47.521	44.503	36.513
Dumai	12.005	9.084	7.997
Riau	203.837	145.669	144.889

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2023

Menurut Azhari F. M dan Mashur D. (2022) Salah satu penyebab peningkatan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Riau adalah dampak *Covid-19* yang menyebabkan timbulnya beberapa fenomena seperti peningkatan pengangguran, lumpuhnya sektor niaga yang disebabkan rendahnya daya beli masyarakat, tingkat inflasi kebutuhan pokok dan rendahnya kuantitas barang kebutuhan. Disamping fenomena *Covid-19* penyebab kemiskinan di Pekanbaru juga disebabkan karena rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia yang ada di Pekanbaru sehingga masyarakat kurang efektif dalam upaya peningkatan kesejahteraannya.

Tabel 2. Jumlah Penduduk di Provinsi Riau

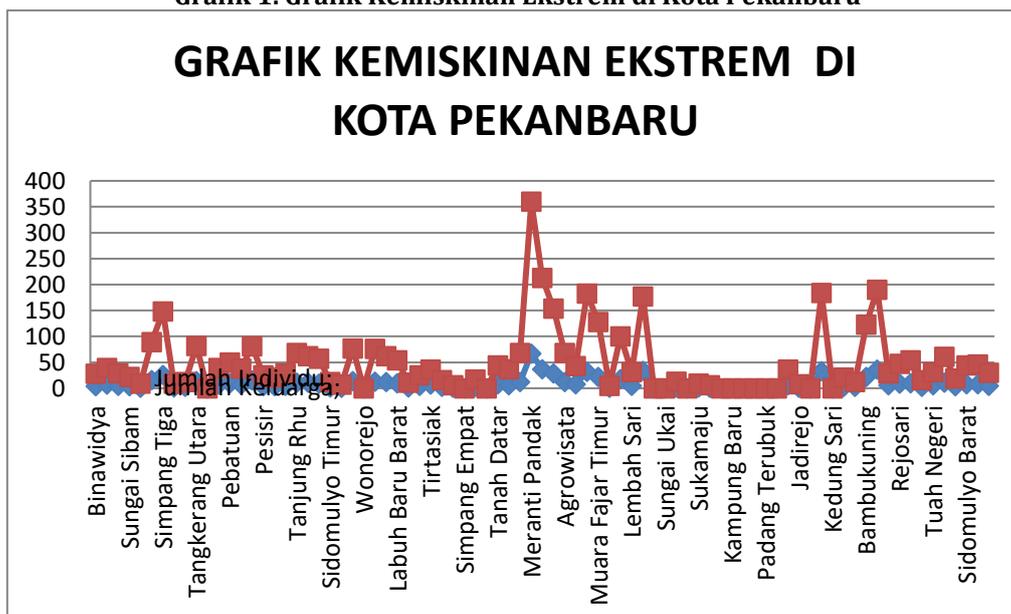
Kabupaten/Kota	Penduduk Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	339.894	345.850	351.786
Indragiri Hulu	453.241	464.076	475.002
Indragiri Hilir	658.025	660.747	663.248
Pelalawan	399.264	410.988	422.907
Siak	466.683	477.550	488.497
Kampar	857.752	878.210	898.840
Rokan Hulu	570.952	582.679	594.438
Bengkalis	573.504	582.973	592.390
Rokan Hilir	646.791	658.407	669.996
Kepulauan Meranti	209.460	2135.32	217.607

Kabupaten/Kota	Penduduk Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Pekanbaru	994.585	1.007.540	1.020.308
Dumai	323.452	331.832	340.310
Riau	6.493.603	6.614.384	6.735.329

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru mencatat, jumlah penduduk yang terdata di Ibu kota Provinsi Riau hingga semester I tahun 2022 mencapai 1.007.540 jiwa. Angka itu mengalami penambahan sebanyak 12 ribu jiwa dari tahun 2021 yang berjumlah 994.585 jiwa. Ironisnya, 60 persen angka pertumbuhan itu berasal dari kaum urban yang bermigrasi ke Kota Pekanbaru. Migrasi itu tidak saja dari kalangan profesional dengan tingkat akademik dan skill baik, namun sejak otonomi bergulir dan Pekanbaru menjadi “pusat gula”, migrasi itu telah didominasi oleh kalangan urban dengan skill dan kemampuan akademik rendah. Hal ini jelas berkorelasi erat dengan semakin tingginya tingkat kemiskinan. Kemiskinan ekstrem atau biasa juga disebut sebagai kemiskinan *absolute*, merupakan sejenis kemiskinan yang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai “suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk didalamnya makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Artinya kondisi kemiskinan ekstrem ini tidak dilihat hanya dari tingkat pendapatan masyarakat disuatu daerah saja, melainkan pada tingkat kesehatan, sanitasi, air bersih dan tingkat pendidikan di daerah tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa ada 708 Kepala Keluarga yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem. Data ini menyoroti tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut, mendorong perlunya upaya konkret dan kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, salah satu kriteria kemiskinan ekstrem yaitu memiliki pendapatan sekitar Rp 322.000 perkapita dan memiliki 5 orang anggota keluarga.

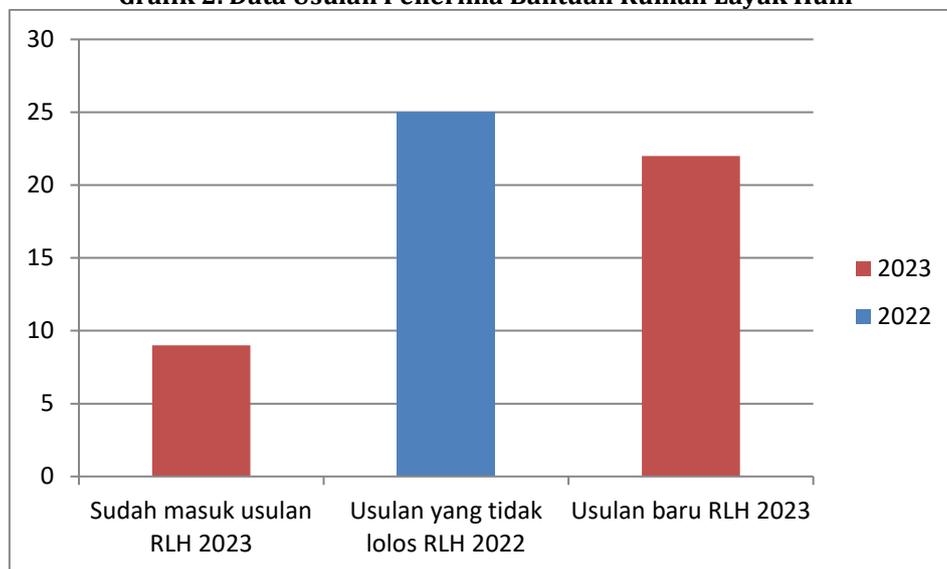
Grafik 1. Grafik Kemiskinan Ekstrem di Kota Pekanbaru



Berdasarkan data yang terdapat pada grafik 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya masyarakat Kota Pekanbaru yang termasuk ke dalam kategori miskin ekstrem.

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menekan kemiskinan di Kota Pekanbaru ini, selain melakukan pendataan ulang kembali permasalahan maupun data-data daerah miskin, Pemerintah kota juga memperbanyak melakukan pembangunan infrastruktur fisik maupun non fisik. Seperti sanitasi, jambanisasi, drainase, renovasi rumah tidak layak huni. Dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, terdapat tiga strategi yang dikembangkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Strategi pertama melibatkan pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terkena dampak kemiskinan. Strategi kedua berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, yang melibatkan pelatihan keterampilan dan bantuan modal kerja untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan pendapatan. Strategi ketiga, yang terakhir, berupaya untuk menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur.

Grafik 2. Data Usulan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni



Sumber: Kasi PPM Kecamatan Rumbai 2024

Dari tabel grafik 2 tersebut terlihat sebanyak 56 masyarakat miskin ekstrem di Kelurahan Meranti Pandak yang masuk ke dalam usulan penerima bantuan rumah layak huni. Hal tersebut merupakan salah satu strategi yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

Tabel 3. Data Masyarakat yang menerima Bantuan

No	Nama	Alamat	Kelurahan
1	SYAIFUL EFENDI	JL YOSUDARSO	MERANTI PANDAK
2	JOHARI	JALAN PESISIR GG HIU 2	MERANTI PANDAK
3	WAWAN IRAWAN	JALAN PESISIR	MERANTI PANDAK
4	SUDI HARTONI	JLN YOSUDARSO	MERANTI PANDAK
5	USMAN	JL. PESISIR GG. RUMBIO	MERANTI PANDAK
6	JONI USMAN	JL YOSSUDARSO	MERANTI PANDAK
7	JASMAN	JL YOSUDARSO	MERANTI PANDAK
8	ISWANDI	JL YOSUDASO GG TUGU	MERANTI PANDAK
9	NURDI SPUTRA	JL YOSSUDARSO	MERANTI PANDAK
10	RAHMAN HASAN	JALAN PESISIR	MERANTI PANDAK
11	M.NAZIR	JALAN PESISIR	MERANTI PANDAK
12	AFRIADI	JL KHAYANGAN GG NORA	MERANTI PANDAK
13	YALDI SAPUTRA	JL YOSUDARSO	MERANTI PANDAK

No	Nama	Alamat	Kelurahan
14	RANDY FERNANDES	JL YOSUDARSO	MERANTI PANDAK
15	TRİYONO	JALAN PESISIR	MERANTI PANDAK
16	HENDRA SUKMA	JL. PESISIR GG. SINGGALANG	MERANTI PANDAK
17	ABDUL WAHID	JL.KENARI	MERANTI PANDAK
18	JASMAN	JL.KENARI	MERANTI PANDAK
19	ALMIZAN	JL YOSSUDARSO	MERANTI PANDAK
20	BASRI	JL. PESISIR GG. SINGGALANG	MERANTI PANDAK
21	AFRIZAL	JL YOSSUDARSO	MERANTI PANDAK
22	OKA WIMBARDI	JL. PESISIR GG. RUMBIO	MERANTI PANDAK
23	ISWARDION	JL.KENARI	MERANTI PANDAK
24	MAISIL	JL. PESISIR	MERANTI PANDAK
25	ZULKARNAIN	JL.KENARI	MERANTI PANDAK
26	NASIKHIN	JL. YOSSUDARSO	MERANTI PANDAK
27	DINO MARINO	JL KHAYANGAN GG LENGGOGENI	MERANTI PANDAK
28	RONI FANDO	JL. PESISIR GG. RUMBIO	MERANTI PANDAK
29	RUDI HARTONO	JL.PESISIR	MERANTI PANDAK
30	DESWANDI	JL.KENARI	MERANTI PANDAK
31	HAMONANGAN	JL. PESISIR. GG. HIU	MERANTI PANDAK
32	KARTINI DAULAY	JLN YOS SUDARSO	MERANTI PANDAK
33	TOMI ERDISON	JL YOSSUDARSO	MERANTI PANDAK
34	DENI NOVIARDI	JLN YOSUDARSO	MERANTI PANDAK
35	ANDI SYAH PUTRA GINTING	JL YOSUDARSO	MERANTI PANDAK
36	NURDIN ISLAMI	JLN YOSUDARSO	MERANTI PANDAK
37	ZONI DARMAN	JL.KENARI	MERANTI PANDAK
38	HENDRI SYAHRIL	JL.KENARI	MERANTI PANDAK
39	BUDI YONO	JL YOSSUDARSO	MERANTI PANDAK
40	MAIFAL	JLN YOS SUDARSO	MERANTI PANDAK
41	SUTAN PARAMIAN	JL YOSSUDARSO	MERANTI PANDAK

Sumber: Kelurahan Meranti Pandak 2024

Dari tabel 3 tersebut juga dapat dilihat bahwa masyarakat miskin ekstrem di Kelurahan Meranti Pandak menerima bantuan. Hal ini juga merupakan salah satu strategi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Dalam INPRES Nomor 4 Tahun 2022 juga di sebutkan bahwa terdapat 30 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diberikan instruksi untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Salah satu implementor dalam kebijakan ini yaitu Menteri Sosial. Oleh karena itu, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi kemiskinan ekstrem. Dinas Sosial memiliki akses ke data yang relevan terkait dengan kemiskinan ekstrem, seperti informasi tentang masyarakat yang terkena dampak kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi mereka. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan aktif dalam menyalurkan bantuan sosial dan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Apabila permasalahan ini tidak ditanggapi dengan serius maka dapat berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Beberapa dampak yang dapat terjadi karena permasalahan kemiskinan ekstrem tersebut adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), stunting, putus sekolah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Implementasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru”. Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru? Apa saja faktor penghambat dalam implementasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru?

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai langkah yang diambil oleh individu, kelompok, pejabat pemerintah, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui keputusan kebijakan. Mereka menyoroti bahwa tahap implementasi berlangsung setelah proses pengesahan dan alokasi sumber daya dan dana yang telah disepakati, bukan pada saat penetapan tujuan dan sasaran kebijakan publik. Kebijakan juga mencerminkan keinginan untuk mengikuti struktur implementasi. Perbedaan dalam desain kebijakan dapat berpengaruh pada pelaksanaannya secara lebih luas. Pelaksanaan kebijakan publik dapat terjadi dalam dua bentuk, yakni melalui program dan kebijakan publik tambahan. Pada dasarnya, implementasi kebijakan publik melalui program dilakukan melalui proyek, kegiatan, dan penggunaan yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan publik. Secara umum, pelaksanaan kebijakan publik dalam bentuk program dilakukan melalui kebijakan undang-undang atau peraturan daerah yang sering disebut sebagai peraturan pelaksana. Proses implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai jenis keputusan seperti keputusan dan instruksi dari presiden, keputusan menteri, keputusan dinas, keputusan kepala daerah, dan sebagainya. Pada dasarnya, implementasi kebijakan ini merupakan program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan.

Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Beberapa model pendekatan dalam implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli memetakan pula faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, sebagaimana bisa diringkas dari Agustino (2008: 140-161), sebagai berikut:

1. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Pada model Metter dan Horn yang merupakan pendekatan *top-down*, implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear yaitu dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan. Dalam konteks model Metter dan Horn ini, variabel-variabel yang memengaruhi kinerja kebijakan publik adalah:
 - a. Ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya, jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan;
 - b. Sumber daya. Sumber daya manusia adalah sumber daya paling menentukan disamping sumber daya yang lain seperti finansial, waktu;
 - c. Karakteristik agen pelaksana. Mencakup organisasi formal dan informal yang harus disesuaikan dengan objek atau entitas tertentu yang diharapkan berubah. Mengubah perilaku manusia misalnya, dibutuhkan karakteristik agen yang tegas, jelas, konsisten;

- d. Sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana bisa saja terjadi karena acap suatu kebijakan bukanlah formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang dirasakan;
- e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka asumsinya terjadinya kesalahan akan sangat kecil;
- f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi akar kegagalan kinerja implementasi kebijakan, demikian sebaliknya.

Konsep Operasional

Menurut Sugiyono (2018) definisi operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik. Untuk memudahkan penganalisaan dan menghilangkan kekeliruan definisi tentang beberapa konsep maka ditambahkan konsep operasional. Konsep operasional adalah konsep yang dijadikan sebagai landasan untuk mengukur gejala permasalahan. Agar menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan konsep, maka peneliti menggunakan teori Menurut Van meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008) yang mengemukakan model implementasi merujuk pada enam indikator yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Enam indikator tersebut adalah:

1. Standar dan tujuan. Dalam setiap kebijakan publik standar dan tujuan harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada tiap-tiap. Karena dengan jelasnya standar dan tujuan kebijakan, maka akan dengan mudah untuk melaksanakan kebijakan. Salah satunya dapat menggunakan suatu “*statement*” dari pada pembuat kebijakan (*policy maker*), yang dapat dicerminkan dalam suatu peraturan, garis petunjuk program, yang didalamnya telah dijelaskan kriteria-kriterianya untuk kepentingan evaluasi suatu kebijakan. Di dalam INPRES Nomor 4 Tahun 2022 disebutkan bahwa salah satu strategi untuk menghapus kemiskinan ekstrem adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat dapat meningkat melalui program pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, program pemberdayaan masyarakat tersebut belum terlaksana secara optimal di Kota Pekanbaru.
2. Sumber daya. Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan standar dan tujuan, sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya dalam menyampaikan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan, kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup:
 - a. Staf, dalam konteks ini setiap staf harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Disamping itu harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang ditanganinya.
 - b. Dana, sumber dana sangat dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan dan operasional implementasi kebijaksanaan.

- c. Informasi, informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijaksanaan tersebut, hal agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dan menginterpretasikan bagaimana mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Disamping itu informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.
 - d. Kewenangan, kewenangan diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.
 - e. Fasilitas, fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan yang meliputi, antara lain gedung, tanah, dan sarana yang kesemuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
3. Komunikasi antar organisasi & aktivitas pelaksana. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah sering mengalami kesulitan dalam proses komunikasi yang kompleks, maka transfer berita ke bawah dalam organisasi dan/atau organisasi lain dan kepada komunikator lain sering mengalami gangguan (*distortion*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi yang sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka saat pelaksanaan kebijakan secara intensif akan lebih sulit. Dengan demikian menurut penjelasan ini, prospek implementasi kebijakan yang efektif jangan ditentukan oleh kejelasan standar dan tujuan kebijakan saja, hendaknya dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten.
 4. Disposisi pelaksana. Disposisi dalam implementasi kebijakan publik ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
 5. Karakteristik pelaksana/struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini, mencakup aspek-aspek seperti, struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya.
 6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Faktor eksternal ini meliputi faktor sosial kemasyarakatan, faktor kondisi ekonomi dan faktor sosial politik yang melingkupi organisasi pelaksana implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat analisis deskriptif. Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah agar peneliti dapat lebih mendalami kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyungguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi agar dapat dipercaya. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, tepatnya di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Alasan penulis tertarik melakukan penelitian di lokasi tersebut karena Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang berwenang dan mendata masyarakat yang tergolong kategori miskin ekstrem di Kota Pekanbaru. Peneliti juga melakukan penelitian di Kelurahan Meranti

Pandak, Kecamatan Rumbai. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru bahwa Kelurahan Meranti Pandak yang memiliki kasus kemiskinan ekstrem tertinggi dibandingkan dengan kelurahan lainnya di Kota Pekanbaru. Untuk memperoleh informan dari peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode yang informannya dipilih karena memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2018). Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah: Silvenus Hendra S.H selaku Lurah Meranti Pandak. Yohanti Viomanna Simanjorang S.Psi selaku Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis Bidang Dayasos Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Yanti, Sari, Agustini, dan Rina selaku Masyarakat miskin ekstrem di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Pekanbaru

Hasil penelitian mengenai implementasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru merupakan hasil dari data dan fakta yang diperoleh langsung di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan, yaitu standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar organisasi & aktivitas pelaksana, disposisi pelaksana, karakteristik pelaksana/struktur birokrasi, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Standar dan Tujuan

Mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Indikator standar dan tujuan ini akan melihat bagaimana standar keberhasilan yang harus dicapai untuk penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara tersebut ketika seseorang telah berhasil keluar dari kondisi kemiskinan yang ekstrim, mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri seperti bahan pokok, sandang, dan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup tidak hanya berdampak pada aspek fisik (kesehatan), tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Dengan memperoleh akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, individu yang dulunya hidup dalam kemiskinan ekstrim dapat merasakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan rasa harga diri dan kemandirian mereka, serta memberikan kesempatan untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Hasil wawancara ini menunjukkan pentingnya upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan wawancara tersebut, standar dan tujuan keberhasilan kebijakan ini adalah masyarakat dapat keluar dari indikator-indikator kemiskinan ekstrem. Indikator-indikator tersebut adalah masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan pengeluarannya sebesar Rp 10.739 per hari atau sekitar Rp 322.170 per bulan. Dengan mengeluarkan individu dari kondisi kemiskinan ekstrim, kebijakan ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini akan mempengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kemandirian individu, serta memberikan kesempatan untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Berdasarkan wawancara tersebut, menurut salah satu warga miskin ekstrem bahwa standar dan tujuan belum tercapai karena tiga strategi dari pemerintah belum terlaksana maksimal. Tiga strategi tersebut yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan

sosial, bantuan rumah layak huni, dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Tabel grafik 2, data menunjukkan bahwa terdapat masyarakat miskin ekstrem di Kelurahan Meranti Pandak yang diusulkan untuk menerima bantuan rumah layak huni. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui infrastruktur, seperti rumah layak huni, telah dilaksanakan sesuai dengan strategi yang terdapat dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022, yang berfokus pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengembangan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dasar. Namun yang terealisasi dari tahun 2022 hanya 1 orang saja. Berdasarkan Tabel 3, data menunjukkan bahwa masyarakat miskin ekstrem telah menerima bantuan beras dari Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ). Hal ini menunjukkan bahwa strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah berjalan dengan baik, tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pihak swasta yang ikut andil dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin ekstrem. Dalam konteks penelitian mengenai strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, program pemberdayaan masyarakat dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk mengatasi situasi kemiskinan. Namun, hasil wawancara dengan Lurah Meranti Pandak dan salah satu masyarakat miskin ekstrem di Kelurahan Meranti Pandak menunjukkan bahwa tidak adanya program pemberdayaan masyarakat yang tersedia dan efektif di wilayah tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa adanya keterlambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dapat berdampak pada kemiskinan ekstrem yang tidak teratasi. Dalam hal ini, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dapat berkontribusi pada ketidakmampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa standar dan tujuan dalam implementasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem belum terlaksana secara optimal. Dapat dilihat dari program rumah layak huni terealisasi hanya 1 saja dari tahun 2022 dan program pemberdayaan masyarakat yang di khususkan untuk kemiskinan ekstrem belum ada.

Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia dianggap sebagai faktor kunci dalam menentukan kesuksesan implementasi. Selain sumber daya manusia, aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah sumber daya keuangan. Pada penelitian ini akan melihat bagaimana implementor memanfaatkan sumber daya seperti staff pelaksana dan juga dana bantuan. Berdasarkan wawancara tersebut sumber daya yang dialokasikan berupa staff pelaksana yang bertugas mendata masyarakat miskin ekstrem dan juga bantuan dana yang diberikan untuk masyarakat miskin ekstrem. Sumber daya manusia, yang dianggap sebagai faktor kunci dalam menentukan kesuksesan implementasi, dalam hal ini adalah staff pelaksana yang bertugas mendata masyarakat miskin ekstrem. Staff ini bertanggung jawab untuk membantu masyarakat miskin ekstrem dalam mengeluarkan dari kondisi kemiskinan ekstrim. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi dan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat. Berdasarkan kedua wawancara tersebut dapat diketahui bahwa selain dari pemerintah, lembaga lain juga turut membantu seperti BASNAS dan juga POS Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa realisasi anggaran untuk penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 mencapai Rp388,6 triliun. Ini memberikan gambaran tentang besarnya sumber daya yang telah digunakan untuk tujuan ini. Realisasi anggaran

yang signifikan menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan. Sedangkan anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp403,9 triliun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah berniat untuk meningkatkan skala dan cakupan program-program penghapusan kemiskinan ekstrem. Peningkatan anggaran ini bisa berarti perluasan program yang sudah ada atau pengenalan inisiatif baru yang lebih efektif. Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,56 triliun untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Besaran anggaran tersebut digunakan dalam program pengurangan beban antara lain melalui bantuan sosial dan jaminan sosial, JKN, BPJS rentan, bantuan pendidikan, bantuan sembako, Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp770,43 miliar. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dialokasikan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari implementor sudah melakukan tugas nya dan juga bantuan sudah di salurkan kepada masyarakat miskin ekstrem.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn adalah proses komunikasi yang terjadi antara badan pelaksana atau organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Komunikasi ini meliputi interaksi, informasi, dan hubungan yang terjadi antara para pelaksana, masing-masing organisasi, dan lingkungan yang menggambarkan implementasi kebijakan. Pada indikator komunikasi antar organisasi ini penulis ingin melihat bagaimana komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Namun faktanya, terdapat *miss-communication* antara Dinas Sosial dan Kelurahan Meranti Pandak. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan data masyarakat miskin ekstrem yang penulis dapatkan dari Dinas Sosial dan Kelurahan Meranti Pandak yang telah penulisan lampirkan pada Tabel grafik 1 dan Tabel 3. Adanya perbedaan data menunjukkan bahwa ada masalah dalam pertukaran informasi atau koordinasi antara kedua pihak, yang merupakan bentuk miskomunikasi. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesalahan dalam pencatatan data, kurangnya sinkronisasi, atau masalah teknis lainnya. Meskipun kedua responden merasa bahwa komunikasi berjalan baik, perbedaan data yang ditemukan menunjukkan bahwa ada area yang perlu diperbaiki dalam hal komunikasi dan koordinasi antar lembaga. Komunikasi antar organisasi memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi para pelaksana kebijakan, serta memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, komunikasi antar organisasi harus dilakukan secara efektif dan konsisten untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan yang efektif.

Disposisi Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana adalah kecenderungan-kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Pada indikator ini, penulis ingin melihat bagaimana indikator disposisi pelaksana pada teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana di Kota Pekanbaru terkait dengan implementasi kebijakan pengurangan kemiskinan ekstremnya menunjukkan tingkat kepatuhan dan kesungguhan yang tinggi. Komunikasi yang efektif antara pelaksana, pemerintah setempat, dan masyarakat juga terlihat dari tanggapan positif Ibu Rina. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut didukung oleh disposisi pelaksana yang kuat dan komunikasi yang baik, yang dapat berkontribusi pada keberhasilan program pengurangan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru.

Karakteristik Pelaksana/Struktur Birokrasi

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, karakteristik pelaksana (agen pelaksana) adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Karakteristik ini mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Penulis ingin melihat bagaimana struktur birokrasi dan disposisi pelaksana mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Dari kedua wawancara tersebut dapat dilihat bahwa karakteristik pelaksana sudah baik. Para pelaksana sudah melakukan tugasnya sebaik mungkin untuk mencapai tujuan bersama yaitu menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru. Dapat di analisis Ibu Yohanti menyatakan bahwa struktur birokrasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak menghambat implementasi program. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi tersebut mampu menyediakan sumber daya dan kemampuan yang diperlukan bagi pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. bu Yohanti juga menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam karakteristik pelaksana atau struktur organisasi yang terkait program. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas dalam karakteristik pelaksana dan struktur organisasi dapat mendukung kinerja implementasi kebijakan dengan baik, karena tidak adanya gangguan atau perubahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan. Bapak Silvenus Hendra menyatakan bahwa menurutnya implementasi program sudah berjalan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang eksternal, pihak luar seperti Lurah Meranti Pandak melihat kinerja implementasi kebijakan sebagai positif dan berhasil mencapai tujuan bersama, yaitu menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dalam teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, Kondisi ekonomi, sosial, dan politik mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dengan cara yang berbeda-beda. Mereka dapat mempengaruhi kemampuan pelaksana untuk mengakses sumber daya yang diperlukan, mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pelaksana, dan mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap tujuan kebijakan. Dalam indikator ini, penulis ingin melihat seperti tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu yang diatur oleh kebijakan tersebut. Pada tingkat individu, budaya kemiskinan ditandai dengan perasaan tidak berharga, tidak berdaya, ketergantungan, rendah diri, dan pasrah yang kuat. Mereka hanya mengetahui kesulitannya, situasi setempat, lingkungan sekitar dan cara hidup mereka. Mereka mencoba beradaptasi dengan situasi yang ada di antara mereka saat ini. Perasaan tidak berharga ini tercermin dari sikap mereka yang hanya mengikuti keputusan kolektif. Ketergantungan di sini tergambar jelas pada kebiasaan mereka yang sangat menggantungkan diri dan nasibnya pada bantuan. Dalam wawancara, Ibu Yohanti Viomanina Simanjorang mengemukakan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, ketika terjadi pemilu, maka pelaksana tidak dapat membuat kerumunan massa karena hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, Ibu Yohanti Viomanina Simanjorang juga menjelaskan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dengan cara lain, seperti dengan mempengaruhi kemampuan pelaksana untuk mengakses sumber daya yang diperlukan dan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pelaksana. Dari hasil wawancara dengan Bapak Silvenus Hendra tersebut, dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat masih kurang. Hal ini tentu saja dapat menghambat keberhasilan implementasi penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan tentang pentingnya melaporkan status keuangan

mereka secara akurat, sehingga bantuan bisa dialokasikan dengan lebih efektif kepada yang membutuhkan. Selain itu, peran RT RW dalam memonitor dan melaporkan status masyarakat juga penting untuk memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran. Analisis yang dapat dilihat berdasarkan kutipan wawancara tersebut bahwa kondisi politik, seperti terjadinya pemilu, dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dengan membatasi kemampuan untuk membuat kerumunan massa saat pembagian bantuan. Hal ini menyoroti bahwa dinamika politik lokal dapat memengaruhi operasional kebijakan di lapangan. Selain itu, pembagian bantuan dengan memperhatikan situasi sosial juga mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Selain itu Bapak Silvenus Hendra menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat dapat memengaruhi kesadaran mereka terhadap kebijakan yang diterapkan. Masih adanya ketidakmampuan masyarakat untuk melaporkan status keuangannya menunjukkan bahwa ada faktor ekonomi yang mempengaruhi interaksi antara kebijakan dengan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya tergantung pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada respons dan partisipasi aktif masyarakat.

Faktor Penghambat Implementasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Pekanbaru

Dalam implementasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Pekanbaru memiliki beberapa penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini, sehingga pelaksanaan kebijakan ini masih belum optimal.

1. Data Masyarakat Miskin Ekstrem tidak *update*. Kriteria masyarakat miskin ekstrem yaitu seseorang yang biaya kebutuhan hidup sehari-harinya sekitar RP 10.739/orang/hari atau Rp 322.170/orang/bulan seperti yang sudah peneliti sebutkan di latar belakang. Faktor penghambat implementasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru selanjutnya adalah data masyarakat miskin ekstrem di meranti pandak tidak *update*. Masih ada masyarakat yang tidak melaporkan bahwa dirinya sudah bisa dikategorikan keluar dari miskin ekstrem. Dari hasil wawancara dengan Bapak Silvenus Hendra tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat tidak melakukan update data yang seharusnya dilakukan apabila masyarakat tersebut keluar dari kriteria miskin ekstrem. Hal ini tentu saja dapat menghambat keberhasilan implementasi penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan tentang pentingnya melaporkan status keuangan mereka secara akurat, sehingga bantuan bisa dialokasikan dengan lebih efektif kepada yang membutuhkan. Selain itu, peran RT RW dalam memonitor dan melaporkan status masyarakat juga penting untuk memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran.
2. Terjadinya Miss-communication. Komunikasi antara Dinas Sosial dan Kelurahan Meranti Pandak belum optimal, sehingga data masyarakat miskin ekstrem di Kelurahan Meranti Pandak yang diterima dari Dinas Sosial dan Kelurahan Meranti Pandak berbeda. Hal ini dapat dilihat dari data yang diterima oleh penulis, yang menunjukkan perbedaan antara data yang diterima dari Dinas Sosial dan Kelurahan Meranti Pandak. Perbedaan data ini dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti:
 - a. Kurangnya Kesadaran: Kurangnya kesadaran tentang jumlah masyarakat miskin ekstrem di Kelurahan Meranti Pandak dapat menyebabkan kurangnya upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut.
 - b. Kurangnya Dukungan: Kurangnya dukungan dari pihak terkait dapat menyebabkan kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut.

- c. Kurangnya Evaluasi: Kurangnya evaluasi terhadap kebijakan dapat menyebabkan kurangnya informasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan.
- d. Kurangnya Informasi: Kurangnya informasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan dapat menyebabkan kurangnya informasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan efektif.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan komunikasi antara Dinas Sosial dan Kelurahan Meranti Pandak, serta meningkatkan kesadaran dan dukungan dari pihak terkait untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru yang sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut van meter dan van horn belum mampu mencapai ke enam indikator tersebut, yaitu pada indikator standar dan tujuan, komunikasi, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pada indikator standar dan tujuan, salah satu strategi penghapusan kemiskinan ekstrem masih belum optimal karena program pemberdayaan masyarakat yang dikhususkan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem belum ada. Pada indikator komunikasi juga belum optimal karena terdapat perbedaan data masyarakat miskin ekstrem yang penulis dapatkan. Selanjutnya pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga belum sepenuhnya baik. Hal ini disebabkan oleh data masyarakat miskin ekstrem tidak *update*, dimana seharusnya masyarakat tersebut tidak mendapatkan bantuan lagi tetapi karena data masyarakat itu belum berubah maka ia masih mendapatkan bantuan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru yaitu data masyarakat miskin ekstrem tidak *update*, dan terjadinya *miss-communication*.

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut: Terkait implementasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penulis memberikan saran perlu adanya perbaikan komunikasi antara Dinas Sosial dan Kelurahan Meranti Pandak terkait data masyarakat miskin ekstrem. Selanjutnya, program pemberdayaan masyarakat yang di khususkan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem diberikan kepada seluruh masyarakat miskin ekstrem agar masyarakat dapat menambah penghasilannya sehingga masyarakat bisa keluar dari kriteria miskin ekstrem. Penulis juga memberikan saran agar diberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak melaporkan keadaan ekonominya. Sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Terkait faktor penghambat implementasi, penulis memberikan saran untuk meningkatkan komunikasi, dan Perlu adanya upaya untuk meningkatkan update data.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi).Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Respon Publik*, 14(3), 1-7.
- Azhari, F. M., & Mashur, D. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Tkpk) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Pekanbaru. *Cross-border*, 5(1), 574-589.

- Faizah, H. N., Meiliyana, M., & Puspawati, A. A. (2023). Implementasi Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Administrativa*, 5(1), 83-90.
- Fatihhurizqi, A., & Kurniawan, B. D. (2022, November). Peran Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Timur Tahun 2020. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2022, No. 1, pp. 1027-1036).
- Hasibuan, S. N., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis sebaran dan faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 7(2), 79-91.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022
- Lestari, P. I., Robiani, B., & Sukanto, S. (2023). Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 1739-1752.
- Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 4(2), 623-636.
- Monika, S. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Putra, N. H., & Anzaikhan, M. (2022). Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Era Pandemi COVID-19. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 39-56.
- Sabrina, R., & Zulkarnaini, Z. (2016). Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Indragiri Hulu (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax*, 2(6), 27.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Taufiq, N. (2022, November). Penciri Kemiskinan Ekstrem di 35 Kabupaten Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2022, No. 1, pp. 895-904).
- Wati, R. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Desa Muara Batu-batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Wisnutama, A., Pramono, J., & Haryanto, A. T. (2023). Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022. *Jl@P*, 12(2).
- Wulan, Y. C., Ati, N. U., & Widodo, R. P. (2019). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)(Studi Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur). *Respon Publik*, 13(4), 104-109.